

Kurikulum dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi: Menuju Pendidikan yang Memberdayakan¹

Ali Maksum

Guru Besar Unesa, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII Jawa Timur

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
Nelson Mandela

Saya sengaja mengutip pernyataan yang melegenda dari mantan Presiden Afrika Selatan dan peraih nobel perdamaian tersebut guna memperkuat keyakinan kita bahwa pendidikan merupakan kunci utama meraih kesuksesan. Jika kita ingin memperbaiki kehidupan, memperbaiki masa depan, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, dan bahkan mengubah dunia, maka jawabannya satu: Pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana yang memungkinkan setiap individu belajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya menuju insan paripurna. Seseorang yang ingin sukses dan menjadi pemenang dalam kehidupan perlu menempatkan pendidikan sebagai pilar terdepan. Negara yang ingin maju dan berhasil perlu menempatkan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan. Sejumlah data bisa ditunjukkan untuk menyatakan bahwa tingkat pendidikan suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuan bangsa itu sendiri. Menurut data World Bank 2014, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia baru mencapai 27%, sementara Malaysia 36%, Thailand 51%, Australia 83%, Amerika 95%, dan Korea 98%. Dilihat dari struktur pendidikan, 55,31% tenaga kerja kita berpendidikan SD ke bawah dan hanya 11,98% berpendidikan perguruan tinggi (Kompas.com, 2014), sementara di Singapura, lebih dari 90% pekerjaanya berpendidikan menengah dan tinggi. Terkait dengan *Human Development Index*, Indonesia ada pada posisi 121 dari 187 negara, sementara Philipina pada peringkat 114, Thailand 89, Malaysia 62, dan Singapura ada pada peringkat 9 (UNDP, 2014). Demikian juga data *global competitiveness report* 2013-2014 menunjukkan bahwa posisi Indonesia ada pada peringkat 38, sementara Thailand pada posisi 37, Malaysia 24, dan Singapura pada posisi 2 (World Economic Forum, 2013).

Tentu, hal yang demikian tidak boleh menjadikan spirit kita melemah untuk berubah dan berbenah menuju yang lebih baik. Kita harus punya keyakinan kuat bahwa Indonesia adalah negara besar, dengan penduduk 250 juta, 17.000-an pulau, lebih dari 1000 suku bangsa, dan 700 bahasa daerah, aneka tanaman tumbuh subur, dan keindahan alam laksana pecahan surga. Tetapi lagi-lagi, harus diakui bahwa prestasi bangsa ini belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Pertanyaannya kemudian, mengapa Indonesia dengan sejumlah kekayaan dan kemewahan alam yang diberikan oleh Tuhan belum bisa membuat bangsa ini menjadi negara maju? Dari sisi waktu kemerdekaan, Indonesia lebih dulu merdeka dibanding Malaysia yang diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada 1957, lebih dulu dibanding Singapura yang memisahkan diri dengan Malaysia pada 1965, dan hanya selisih 2 hari dengan Korea yang merdeka pada 15 Agustus 1945. Dilihat dari jumlah perguruan tinggi, Indonesia paling banyak dibanding sejumlah negara Asean, bahkan dibandingkan dengan China sekalipun yang memiliki penduduk 1,3 milyar. Indonesia juga memiliki rasio guru-murid yang lebih baik dibanding Malaysia, China, Inggris, dan Amerika.

Dari telaah dan perenungan mendalam, saya sampai pada kesimpulan bahwa yang membuat suatu bangsa maju bukan karena keberlimpahan sumberdaya alam atau lamanya

¹ Makalah disampaikan dalam seminar nasional hasil penelitian pendidikan dan pembelajaran, 25-26 April 2015 di STKIP PGRI Jombang

suatu negara berdiri, tetapi lebih pada kualitas manusianya. Sementara itu, kualitas manusia hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan yang memberdayakan, sebuah proses pendidikan yang membuat individu menjadi mandiri, mampu berpikir kritis, inovatif, berkarakter, dan berdaya saing.

Pendidikan yang memberdayakan

Pendidikan yang memberdayakan menempatkan peserta didik sebagai insan yang aktif dan dengan segenap potensi yang dimilikinya, mampu mengonstruksi pengetahuan dan pengalamannya. Sebagaimana lima pilar yang dikampanyekan Unesco (2009a), yakni *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transform one self and society*. Dengan demikian, individu pembelajar tidak sekadar tahu tetapi juga mampu mengonstruksi pengetahuan, terampil menerapkan pengetahuan yang dimiliki, baik dalam konteks dirinya maupun lingkungan masyarakatnya. Setiap individu, menurut Debono (2015), memiliki kemampuan mengorganisasikan dirinya, yang kemudian disebut sebagai *self-organizing system*. Individu sebagai suatu sistem, akan mampu mengelola ikhwat dirinya untuk maju dan berkembang (Mayer, 2014). Sejalan dengan ini, fungsi institusi pendidikan adalah menciptakan lingkungan dan iklim belajar yang memungkinkan segenap potensi pembelajar teraktualisasikan. Sumber-sumber belajar seperti perpustakaan, laboratorium, buku, jurnal, dan internet cukup tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Proses pembelajaran harus mampu memberikan inspirasi, menumbuhkan dan memperkuat rasa keingintahuan (*curiosity*) mahasiswa terhadap sesuatu. Rasa keingintahuan yang kuat akan menumbuhkan budaya belajar, keberanian bertanya, dan keinginan mencipta. Kondisi yang demikian merupakan iklim yang baik bagi munculnya inovasi dan kemajuan suatu bangsa. Inilah yang dipikirkan dan dilakukan oleh Singapura, Korea, dan China, yaitu *how to instill a culture of enquiry and critical thinking into their education systems* (Leslie, 2014).

Bertalian dengan pendidikan yang memberdayakan, ada tiga esensi dasar yang menjadi “roh” penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan yang mencerdaskan, pendidikan yang menyejahterakan, dan pendidikan yang memanusiakan. Sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945, pendidikan berkelindan dengan upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Esensi dasarnya adalah *to train the individual mind and to maintain personal independence*. Seseorang yang terdidik dengan baik, akan mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik, mampu berpikir kritis dan konstruktif, serta mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efisien dan efektif. Sayangnya, pendidikan kita selama ini cenderung membuat peserta didik sangat tergantung dengan perintah guru, sehingga peserta didik merasa inferior, miskin kreatifitas dan inovasi, dan dalam jangka panjang merusak kemampuannya mengatasi masalahnya sendiri (Maksum, 2011). Karena itu, tidak mengherankan dalam ajang kompetisi yang menguji kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengatasi masalah, seperti PISA (*programme for international student assessment*), dari 65 negara yang dilakukan asesmen, Indonesia ada pada peringkat 64, sementara Malaysia pada peringkat 52, Thailand 50, Singapura 2, dan China 1 (OECD, 2013). Dalam realitas kehidupan sehari-hari, indikasi rendahnya level berpikir dan kemampuan memecahkan masalah juga masih banyak terjadi di masyarakat. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang terkena penipuan berkedok investasi dan penipuan dengan modus hadiah, yang nyata-nyata tidak masuk akal sehat. Demikian juga orang begitu mudah melakukan tindak kekerasan, menyakiti, dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain karena hal yang sepele.

Dibutuhkan kesadaran yang kuat bahwa tujuan utama pendidikan bukan untuk mencari nilai atau mendapatkan ijazah. Apalagi menempuh jenjang pendidikan tinggi sekadar untuk prestise dan mendapatkan pengakuan yang sejatinya semu. Penyelenggaraan pendidikan yang sekadar berorientasi pemerolehan ijazah tanpa akuntabilitas dan proses yang benar, tidak saja

melanggar ketentuan tetapi juga mendestruksi kecerdasan publik, menjadi lemah pikir yang dalam jangka panjang dapat berujung pada pembodohan bangsa. Itulah mengapa pemerintah, dalam hal ini Dikti dan Kopertis, melarang keras penyelenggaraan kelas jauh, pendidikan di luar domisili tidak sesuai ketentuan, pemendekan masa studi, dan pengebirian SKS. Dikti dan Kopertis sebagai representasi negara punya kewajiban untuk melindungi kepentingan publik.

Setelah bisa dipastikan kemampuan berpikir kritis dan konstruktif terbentuk, proses berpikir perlu dijaga agar tetap jernih, jangan sampai terjadi bias atau sesat pikir. Hal yang demikian bisa terjadi apabila seseorang tidak lagi independen, misalnya karena ada muatan emosi, kepentingan pribadi, dan tekanan dari luar. Perlu diingat, sesar pikir bisa menyebabkan sesat perilaku. Hukum dan aturan sulit ditegakkan manakala berhimpitan dengan kerabat keluarga dan pertemanan yang muatan emosinya begitu kuat. Pengadaan barang dan penyelenggaraan kegiatan bisa koruptif apabila ada kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga suatu kebijakan yang pruden bisa berbelok ditengah jalan jika ada intervensi atau tekanan dari luar. Intinya, pola pikir dan sikap imparial perlu dirawat agar seseorang bisa tetap berpikir jernih dan memiliki laku jalan lurus.

Pendidikan yang memberdayakan juga berarti menyejahterakan. Ada relasi yang cukup kuat antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan yang baik akan mengangkat derajat seseorang. Individu yang terdidik dengan baik akan dapat membuka dan menciptakan peluang bagi diri dan orang lain yang berdampak pada ekonomi. Dari aspek ekonomi, *per capita income* Indonesia sebesar 4.730 US\$, sementara Thailand 9.280 US\$, Malaysia 16.270 US\$, Jepang 36.750, dan Singapura telah mencapai 60.110 US\$ (World Bank, 2014). Dalam hal ini, kita bisa belajar dari Malaysia, Singapura, dan Korea. Bukankah pada awal kemerdekaan mereka kondisinya relatif mirip sebagai negara yang baru merdeka, yakni terjadi keterbelakangan ekonomi yang masif. Terlebih mereka tidak memiliki sumberdaya alam yang cukup dibanding Indonesia. Sekarang bisa kita lihat bagaimana kehebatan mereka dalam kesejahteraan ekonomi. Lagi-lagi, kunci keberhasilan mereka adalah menempatkan pendidikan yang bermutu sebagai pilar utama. Tesis ini yang rupanya menginspirasi program beasiswa bidikmisi Kemdikbud, memutus mata rantai kemiskinan bagi keluarga kurang mampu dengan memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa, yang secara ekonomi kurang beruntung namun secara akademik sangat potensial, melalui pendidikan yang bermutu. Setelah mereka lulus, maka diharapkan bisa mendapatkan atau menciptakan pekerjaan yang dapat mengangkat ekonomi keluarga.

Kesejahteraan tidak hanya bermakna ekonomi, melainkan juga kualitas hidup manusia yang ditunjukkan oleh kondisi kesehatan, baik fisik maupun psikis. WHO memperkirakan sekitar 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit nonmenular, seperti jantung, hipertensi, kardiovaskular, dan diabetes melitus, yang sebagian besar disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa jumlah penderita stroke pada 2015 meningkat lebih dari 100%. Pada tahun 2013 tercatat 12,1 penderita per 1000 penduduk, sementara pada 2015 menjadi 25-35 orang per 1000 penduduk (Kompas, 16 April 2015). Sebuah penelitian yang dilakukan di Jakarta juga menunjukkan bahwa ada 67% penduduk Jakarta mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, 95% penduduk wanita memiliki lingkar perut di atas normal, dan pada saat yang sama, 87% pria memiliki riwayat hipertensi (The Jakarta Post, May 11, 2012). Data-data tersebut berkaitan erat dengan budaya gerak, dalam hal ini olahraga, yang masih rendah. Fakta tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Komnas Penjasor 2011 bahwa tingkat kebugaran jasmani remaja kita (14-17 tahun) sangat memprihatinkan, putra 33,66 ml/kg/min dan putri 24,23 ml/kg/min. Secara rinci, untuk remaja putra, 56% kategori sangat rendah, 15% kategori rendah, 23% kategori sedang, dan hanya 6% masuk kategori baik ke atas. Sementara untuk putri, 64% masuk kategori sangat rendah, 30% kategori rendah, 3% kategori sedang, dan hanya 2% masuk kategori baik.

Pendidikan yang memberdayakan juga mengandung makna memanusiakan. Istilah “memanusiakan” penting untuk digaris bawahi mengingat seseorang bisa kehilangan kemanusiaannya manakala *limbic system* yang merupakan *locus* berprosesnya syahwat “kebinatangan” tidak terkelola dan terdidik dengan baik. Nafsu ingin menguasai, menghancurkan orang lain yang tidak sejalan, keserakahan ekonomi, termasuk libido ada di wilayah ini. Karena itu, kesanggupan untuk menahan dan mengelola syahwat-syahwat instinktif yang dapat mendistorsi sifat kemanusiaan perlu dirawat. Acapkali kita tidak tahan atas godaan kemewahan dan kenikmatan di sekitar kita, apakah itu berupa kedudukan, rekognisi sosial, materi, bonus, komisi, dan bentuk gratifikasi lainnya. Eksperimen klasik Walter Mischel terhadap sekelompok anak usia 4-5 tahun sungguh menarik untuk disimak. Anak-anak dimasukkan ke dalam ruangan, duduk secara beraturan, dan di hadapan setiap anak disediakan *marshmello* (semacam permen-coklat). Mereka diberi dua opsi, pertama, ketika bel berbunyi anak-anak boleh langsung makan *marshmello* tersebut, atau opsi kedua menahan diri sampai 15 menit hingga eksperimenter datang dan memberikan *marshmello* dua kali lipat. Ada sebagian yang memilih opsi pertama dan sebagian yang lain memilih opsi kedua. Setelah mereka remaja dan dewasa dicek lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bisa menunda kenikmatan (*delayed gratification*) bisa lebih sukses dikemudian hari, baik dalam akademik, kompetensi sosial, dan kemampuan menghadapi tekanan, dibanding dengan mereka yang tidak dapat menahan diri (Maksum, 2014).

Laku keserakahan sebagian bangsa ini bisa kita lihat dari indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga *Transparency International* tahun 2014, Indonesia ada pada peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei dengan skor 34 pada rentang skala 0-100. Sementara Philipina dengan skor 38, Malaysia 52, Jepang 76, dan Singapura 84. Demikian juga dalam penyalahgunaan narkotika, BNN memprediksi prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada 2015 mencapai 5,1 juta orang dan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Tentu, hal ini sangat mengawatirkan, kita berada dalam darurat narkoba. *The last but not least* adalah soal terorisme yang menghentak kemanusiaan. Kelompok radikal yang menggunakan emosi agama ini, tanpa disadari ideologinya telah menelisik jauh pada sejumlah remaja kita. Mereka menganggap kebenaran ada pada dirinya dan pihak yang berbeda dianggap salah dan absah untuk dihancurkan. Sejatinya mereka merupakan anak-anak yang baik, tetapi salah asuhan dan salah jalan menempuh kekerasan “suci” untuk memperoleh “surga”.

Sebagian besar persoalan kebangsaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas akan bisa diatasi dengan pendidikan yang memberdayakan: mencerdaskan, menyejahterakan, dan memanusiakan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mewujudkan tujuan tersebut? Rekonstruksi kurikulum menjadi agenda yang urgen untuk dilakukan.

Kurikulum, antara dokumen dan implementasi

Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum menjadi urgen karena merupakan peta jalan menuju harapan, yakni manusia Indonesia yang hendak kita wujudkan. Perlu disadari bahwa tantangan generasi berubah dari waktu ke waktu, dan karena itu pula, kurikulum tentu perlu menyesuaikan dengan kebutuhan jamannya. Dalam konteks pendidikan tinggi, kurikulum mengalami beberapa kali perubahan (Kemdikbud, 2014b). Pada tahun 1990-an, konsep ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) mendapatkan tempat yang terhormat dalam diskursus pembangunan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Karena itu, pada kurikulum 1994 bisa disebut sebagai kurikulum berbasis isi, yang diarahkan pada penguasaan Iptek. Memasuki tahun 2000, Unesco mempromosikan empat pilar pendidikan, yakni *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Beriringan

dengan itu, sekitar 2002, istilah kompetensi menjadi wacana yang sangat kuat bertalian dengan kualitas lulusan. Oleh karenanya, kurikulum saat itu dikatakan sebagai kurikulum berbasis kompetensi.

Lalu, bagaimana halnya dengan kurikulum yang sekarang? Keluarnya sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi, memberikan pesan kuat bahwa pendidikan tinggi harus mampu melahirkan manusia Indonesia yang cakap, berkarakter, dan berdaya saing. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Kemdikbud, 2012a). Selain itu, pendidikan tinggi harus mampu memberdayakan mahasiswa menjadi manusia terdidik (*educated person*) yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Manusia Indonesia juga harus mampu sejajar dan bersaing dengan warga bangsa yang lain. Kualifikasi manusia Indonesia seperti itulah yang diharapkan bisa terbentuk melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Ada lima keterampilan pokok yang perlu dimiliki, yakni keterampilan beradaptasi, berkomunikasi kompleks, memecahkan masalah nonrutin, manajemen diri, dan berpikir sistem (National Academy of Sciences, 2011).

Lalu, bagaimana kurikulum dikembangkan? Sesuai semangat UU no 12 tahun 2012 yang memberikan otonomi pada perguruan tinggi, maka pengembangan kurikulum diserahkan sepenuhnya pada otonomi kampus. Entitas program studi dan asosiasi keilmuan, termasuk asosiasi profesi menjadi *think tank* penyusun kurikulum. Tentu menjadi lebih baik, jika penyusunan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan, terutama pengguna lulusan.

Ada dua model struktur yang dapat digunakan dalam menyusun kurikulum, yakni model serial dan model parallel (Kemdikbud, 2014b). Model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika struktur keilmuan. Mata kuliah disusun dari yang paling dasar menuju lanjutan. Dalam model ini dikenal istilah matakuliah prasyarat, yang menunjukkan keterhubungan matakuliah yang satu dengan yang lain. Adapun model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Model ini lebih menyerupai sistem blok, menyusun matakuliah berdasarkan ketercapaian kompetensi, bukan sekadar pembelajaran semesteran. Selain dua model tersebut, ada model lain yang bisa juga dipertimbangkan untuk diterapkan, yakni model konsektif dan model konkuren. Kedua model ini biasanya diterapkan dalam konteks pendidikan guru. Model konsektif adalah menyusun struktur matakuliah secara berurutan dengan memperhatikan capaian pembelajaran. Ada perbedaan yang tegas antara penguasaan kompetensi keilmuan dan kompetensi pedagogik. Mengacu model konsektif, maka pendidikan guru didesain menjadi 4+1, yakni empat tahun fokus pada penguasaan kompetensi keilmuan dan satu tahun kompetensi profesi. Adapun model konkuren menyusun kurikulum yang mengintegrasikan antara kompetensi keilmuan dan kompetensi profesi pada saat yang bersamaan, sebagaimana yang selama ini dilakukan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan.

Apakah kurikulum yang telah didesain sedemikian rupa pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai? Di sinilah persoalannya. Pergulatan antara kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum *in action*. Acapkali kurikulum sebagai dokumen telah tersusun dengan begitu baik, namun pelaksanaannya jauh panggang dari api. Dalam konteks ini, peran pengelola kurikulum, dalam hal ini ketua program studi dan peran pelaksana kurikulum, yakni dosen, menjadi sangat urgen. Ada korelasi yang sangat kuat antara kepemimpinan akademik dan kualitas dosen terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum, Semakin tinggi komitmen Kaprodi dan dosen dalam melaksanakan kurikulum, semakin tinggi pula peluang keberhasilan capaian-capaian kurikulum.

Capaian pembelajaran dan KKNI

Ada semacam *missing link* antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Persoalan pengangguran bukan semata karena ketiadaan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dan lulusan yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Artinya, ada sejumlah pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh lulusan perguruan tinggi. Pemangku kepentingan tidak tahu capaian pembelajaran yang dimiliki oleh lulusan. Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor? Bagaimana pula dengan mereka yang memiliki kemampuan memadai meski tidak diperoleh melalui pendidikan formal? Pertanyaan lanjutan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah lulusan pendidikan sarjana di Indonesia setara dengan lulusan sarjana dari Singapura, Malaysia, atau Thailand? Begitu juga berlaku sebaliknya? Dalam konteks ini, globalisasi pendidikan menjadi pertimbangan, terlebih seiring kebijakan masyarakat ekonomi Asean yang akan berlaku pada akhir 2015. Ikhwal inilah yang pada dasarnya melatarbelakangi keluarnya Perpres no. 8 tahun 2012 mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi SDM yang menyetarakan capaian pembelajaran bidang pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja. Ada 9 level dalam KKNI, yang dari perspektif pendidikan formal, level 1-2 adalah pendidikan menengah, level 3-6 adalah pendidikan diploma dan sarjana, level 7 profesi, level 8 magister, dan level 9 doktor. Dari perspektif dunia kerja, level 1-3 adalah operator, 4-6 teknisi/analisis, dan 7-9 ahli.

KKNI pada dasarnya juga merupakan respons Indonesia setelah meratifikasi konvensi Unesco tentang pengakuan pendidikan, ijazah, serta gelar pendidikan tinggi di Asia dan Pasifik pada 16 Desember 1983 dan diperbarui pada 30 Januari 2008 (Unesco, 2005). Sungguh disadari bahwa di setiap Negara memiliki cara, sistem, dan budaya yang berbeda satu sama lain. Pada saat yang sama, ada kebutuhan untuk menyetarakan beberapa perbedaan tersebut, mengingat terjadinya masifikasi pendidikan tinggi dewasa ini (Unesco, 2009b). Adanya KKNI memberikan kesempatan kepada siapapun dia, dengan kompetensi yang dimiliki dapat disejajarkan satu dengan yang lain. Pencapaian KKNI dapat dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karier di dunia kerja, dan akumulasi pengalaman individu.

Terkait dengan KKNI, apa yang perlu dilakukan oleh kampus? Perguruan tinggi perlu menggunakan KKNI sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran sehingga lulusannya sesuai dengan kualifikasi jenjang KKNI. Mengacu Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi, melalui Prodi, perlu menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu level KKNI. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh seseorang melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Dengan demikian, Prodi dengan segenap sumberdaya yang dimiliki, *multitrack and multimethod*, mengupayakan terwujudnya capaian pembelajaran. Setelah dipastikan rumusan capaian pembelajaran, langkah berikutnya adalah menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum mengacu KKNI. Terakhir, mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Unsur capaian pembelajaran mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Dengan demikian, dalam konteks capaian pembelajaran, siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus memiliki sikap dan tata nilai keindonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan yang tepat dan didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku tanggung jawab sebelum dapat menuntut haknya (Kemdikbud, 2014b).

Pemenuhan standard

Capaian pembelajaran dalam kurikulum dapat dioptimalkan apabila ada standarisasi, mulai dari masukan, proses, dan keluaran. Secara lebih komprehensif, ada Permendikbud no. 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), yang bisa dijadikan kerangka kerja mewujudkan capaian pembelajaran. Terdapat 10 standar yang perlu dipenuhi, yaitu: standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam setiap standar tersebut terdapat ketentuan yang perlu diacu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Meski demikian perlu diingat bahwa sejatinya SNPT adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan tridharma, yang bertujuan menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi dan mencapai mutu sesuai kriteria yang ditetapkan. Karena merupakan kriteria minimal, maka perlu diupayakan dan didorong agar perguruan tinggi melampaui kriteria yang ditetapkan. Pada saat yang sama, penetapan standar juga perlu dievaluasi dan disempurnakan secara periodik dan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penekanan pada beberapa standar yang menuntut perhatian lebih. Pertama adalah masalah dosen. Dosen merupakan “roh” dari sebuah perguruan tinggi. Maju mundurnya perguruan tinggi sangat tergantung pada kualifikasi dan kompetensi dosennya. Kualifikasi pendidikan minimal seorang dosen adalah S2 untuk program studi diploma dan sarjana, sementara untuk program pascasarjana adalah S3. Meski kebijakan ini sudah diberlakukan sejak 2005, bersamaan dengan ditetapkannya UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, tetapi hingga sekarang masih banyak dosen yang berstatus S1. Berdasarkan data di PD-Dikti pada 12 April 2015, terdapat 38.796 atau 22% dari total 178.270 dosen yang masih bergelar S1 di Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Sementara itu, dosen yang berkualifikasi S2 sebanyak 61% dan S3 sebanyak 13%, serta yang memperoleh jabatan professor baru 3%. Sebuah perguruan tinggi dianggap unggul, menurut BAN-PT, manakala jumlah dosen bergelar Doktor $\geq 50\%$ dan yang memiliki jabatan akademik professor $\geq 30\%$. Seorang dosen juga perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti sejumlah seminar, pelatihan, dan sejenisnya. Untuk bisa memberikan inspirasi dan pencerahan kepada mahasiswa, rasanya tidak mungkin seorang dosen hanya mengandalkan pengetahuan masa lampau, buku yang digunakan sudah tertinggal lebih dari 10 tahun, tidak pernah melakukan penelitian dibidangnya, dan abai terhadap perkembangan keilmuan terkini.

Kedua, terkait sarana dan prasarana. Mengenai sarana prasarana, tidak cukup sekadar adanya ruang kuliah, tetapi juga laboratorium, perpustakaan, dan tempat diskusi yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi dan menggunakan sumber-sumber belajar secara optimal. Demikian juga tempat/ruang untuk pengembangan bakat dan minat mahasiswa seperti karya ilmiah, olahraga, dan kesenian. Dosen juga diberikan tempat/ruang untuk menjalankan aktifitas profesinya seperti membaca, menyiapkan perkuliahan, dan menerima konsultasi mahasiswa. Masih banyak perguruan tinggi yang belum bisa menyediakan fasilitas, baik bagi dosen dan mahasiswa, meski dalam standar yang minimal.

Ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan kelayakan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Dalam satu semester, pertemuan dilakukan selama 16 kali pertemuan. Perlu juga diingat bahwa pengertian 1 sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Dalam bentuk pembelajaran kuliah 1 sks mencakup 50 menit tatap muka, 50 menit terstruktur, dan 60 menit mandiri. Pembelajaran akan optimal jika sks diterapkan secara murni dan konsisten. Mahasiswa belajar tidak hanya saat bertemu dengan dosen, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk pendalaman melalui kegiatan

tersruktur dan mandiri. Dalam konteks pembelajaran, yakni interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, perlu dijaga keseimbangan terkait beban kerja. Bagi mahasiswa, beban normal belajar adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu, setara dengan 18 SKS per semester. Sementara itu bagi dosen, beban kerja yang mencakup tridharma dan tugas tambahan, paling sedikit 40 jam per minggu atau setara dengan 12 sks. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, diharapkan iklim akademik akan tumbuh sehingga capaian pembelajaran dapat terwujud. Beban belajar/kerja yang jauh di bawah atau di atas normal tentu tidak diharapkan, apalagi yang berkorelasi negatif dengan penguatan iklim akademik.

Perlu kesadaran yang cukup kuat dari dosen bahwa paradigma pembelajaran sudah berubah, tidak lagi berpusat pada dosen, tetapi mahasiswa (Kemdikbud, 2014b). Dalam konteks ini, mahasiswa belajar mencari dan mengonstruksi pengetahuan, bukan sekadar menerima pengetahuan dari dosen. Demikian juga pengetahuan harus dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar, bukan sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer ke mahasiswa. Peran dosen lebih sebagai fasilitator dan motivator, sementara mahasiswa menunjukkan kinerja kreatif, yang mengintergrasikan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Metodenya mengarah pada *inquiry and discovery* dan sumber belajarnya bersifat multi dimensi dan kontekstual.

Penilaian juga sebaiknya dalam bentuk *authentic assessment* atau *performance assessment*, yaitu penilaian atas proses perolehan, penerapan pengetahuan dan ketrampilan, melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses dan produk. Penilaian model ini terdiri dari tiga kegiatan pokok, yakni dosen memberi tugas, mahasiswa menunjukkan kinerjanya, dan dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik (Kemdikbud, 2014b). Perlu diketahui bahwa rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang digunakan dosen dalam menilai dan memberi tingkatan ketercapaian hasil belajar mahasiswa. Dalam rubrik termuat daftar karakteristik unjuk kerja yang diharapkan terwujud dalam proses dan hasil kerja serta dijadikan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut.

Keempat, terkait dengan penelitian. Perguruan tinggi harus memiliki kebijakan terkait arah, fokus, dan mekanisme penelitian. Jangan sampai perguruan tinggi hanya menghabiskan waktu untuk mengelola proses belajar-mengajar. Pengajaran hanyalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Para dosen harus didorong untuk melakukan penelitian. Dosen perlu dirangsang untuk meraih dana penelitian dari luar institusi. Bagi mereka yang masih pemula, institusi perlu memberikan insentif, meski tidak besar, misalnya 3-5 juta per proposal. Dalam menciptakan budaya meneliti, keterlibatan dosen dan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian menjadi penting. Seiring dengan produk penelitian, publikasi ilmiah menjadi keniscayaan. Jumlah artikel yang terpublikasi, artikel yang disitasi, bahkan diperolehnya hak kekayaan intelektual, termasuk paten merupakan indikator utama kualitas penelitian di suatu perguruan tinggi.

Soal mutu, jangan ditawar

Berdasarkan data PD-Dikti pada 26 Maret 2015, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4.268, terdiri dari 365 PTN dan 3.903 PTS, dengan total prodi sebanyak 21.864. Sementara itu, jumlah mahasiswa sebesar 7,4 juta, terdiri dari 2,8 juta di PTN dan 4,6 juta di PTS. Adapun jumlah dosen bergelar Doktor sebesar 22.430 (12%) dan yang memiliki jabatan akademik profesor sebesar 4.948 (3%) dari keseluruhan 184.551 dosen. Bandingkan dengan jumlah perguruan tinggi di Amerika, yakni 4.599 dengan 21 juta mahasiswa. Dari segi kuantitas, sangat boleh jadi yang kita miliki sudah lebih dari cukup. Namun dari segi mutu, masih menyisakan persoalan yang serius.

Pendidikan yang tidak bermutu tidak saja merugikan lulusan, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi beban bangsa. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu memang butuh biaya, tetapi ketersediaan biaya tidak serta merta pendidikan bermutu akan terwujud. Dalam konteks yang mikroskopik, misalnya iklim akademik, tidak dibutuhkan biaya mahal. Ketika mahasiswa disediakan jaringan listrik dan wifi, maka para mahasiswa dengan mudah mengakses segala informasi yang ada di internet. Mereka bisa menjelajahi perkembangan keilmuan terkini melalui berbagai tulisan, jurnal, dan kegiatan akademik yang tersaji di dunia maya. Bahkan sejumlah perguruan tinggi hebat, seperti MIT, bahan ajarinya dapat diunduh melalui *website* yang ada secara gratis. Yang justru menjadi keprihatinan kita selama ini adalah soal *curiosity*, rasa ingin tahu yang lemah terhadap pengetahuan yang terwujud dalam kerja yang “sistematis” dan penuh “kesungguhan”. Kebiasaan jalan pintas menjadi *mainstream* laku sebagian komunitas akademik. Misalnya, ingin mendapatkan ijazah, tetapi tidak mau menjalani kuliah secara wajar. Membutuhkan artikel tidak mau berproses secara wajar, alih-alih dengan membaca, meneliti, dan menulis, tetapi justru mencari tulisan orang lain yang serupa, yang pada akhirnya berujung pada tindakan plagiasi.

Saya ingin memberikan penguatan perlunya budaya membaca dan menulis dengan mengutip hasil penelitian Robert Wilson, et.al. (2013), neurologist pada Rush University Medical Center Chicago. Mereka meneliti 300 orang lanjut usia dan memeriksa kapasitas memori dan keterampilan berpikir setiap tahun. Mereka juga ditanya mengenai kebiasaan, menulis, dan aktifitas kognitif lainnya, termasuk saat masa anak-anak dan remaja. Mereka diikuti perkembangannya sampai meninggal dan selanjutnya diperiksa kondisi otaknya untuk membuktikan adanya demensia. Hasil penelitian cukup mengejutkan bahwa subyek yang jarang membaca dan menulis, mengalami penurunan fungsi kapasitas mental 48% lebih cepat dibanding rata-rata subyek penelitian. Karena itu, mari kita semua menjadikan kebiasaan membaca dan menulis sebagai gaya hidup, yang tidak saja berpengaruh pada profesionalisme sebagai dosen, tetapi juga meninggikan kualitas hidup kita sebagai manusia.

Budaya mutu harus menjadi bagian dari budaya kerja akademik kita. Apalagi sudah dikeluarkan Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar yang telah ditentukan. Ada dua model penjaminan mutu, pertama bersifat internal yang lazim disebut SPMI dan kedua bersifat eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT. Keduanya berjaln berkelindan dalam mengupayakan terwujudnya mutu pendidikan tinggi. Sudah bukan waktunya lagi kita bekerja sekadar menggugurkan kewajiban, tidak pernah berpikir apakah yang kita kerjakan memberikan manfaat dan nilai lebih kepada pihak lain. Terlalu besar resiko yang harus ditanggung manakala mutu dikorbankan. Tidak bisa lagi kita mengajar hanya sekadar mengalihkan pengetahuan yang kita miliki kepada mahasiswa, tanpa ada jaminan hal itu dapat mengubah dan menginspirasi mahasiswa kearah yang lebih konstruktif. Ketika kita meneliti, tidak cukup sekadar memenuhi kredit poin kenaikan pangkat, tanpa pernah berpikir apakah yang kita teliti berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia.

Ada banyak ukuran mutu yang bisa digunakan untuk menilai keunggulan sebuah perguruan tinggi. Misalnya, berapa proporsi guru besar dan doktor yang dimiliki, publikasi ilmiah yang dihasilkan, termasuk paten, yang diyakini berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks publikasi ilmiah, kita juga masih kalah jauh dengan sejumlah negara Asean. Pada tahun 2013, publikasi Indonesia sebanyak 4.175, sementara Thailand 11.313, Singapura 17.052, dan Malaysia sebanyak 23.190 (www.scimagojr.com – diunduh 17 Nov 2014). Perkembangan publikasi ilmiah Malaysia begitu luar biasa, pada tahun 2007 sebanyak 5000 dan tahun 2013 menjadi empat kali lebih.

Pada suatu forum kerjasama antar universitas, saya sempat berdiskusi dengan Naib Canselor (Rektor) Universiti Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Prof. Yahya bin Ibrahim, apa yang dilakukan perguruan tinggi di Malaysia terkait percepatan publikasi ilmiah yang belakangan ini begitu signifikan? Prof. Yahya menyatakan bahwa yang utama adalah mendorong dosen dan mahasiswa mengunggah karya ilmiah yang dihasilkan, baik dari skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk penelitian lainnya. Hal yang sama sejatinya telah dilakukan di Indonesia, dengan keluarnya surat edaran Dirjen Dikti pada Januari 2012. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan publikasi karya ilmiah, maka lulusan S1 harus menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, S2 pada jurnal nasional terakreditasi, dan S3 pada jurnal internasional. Meski belum signifikan, seiring waktu langkah ini dapat membangkitkan kinerja publikasi kita.

Daftar bacaan

- Debono, E. (2015). *Serious creativity: How to be creative under pressure and turn ideas into action*. London: Vermilion.
- Kemdikbud (2014a). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud (2014b). *Buku kurikulum pendidikan tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti, Kemdikbud.
- Kemdikbud (2014c). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud (2012a). *Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud (2012b). *Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kompas (2015). *Ancaman saat tubuh menua*, edisi 16 April, h.14
- Kompas.com (2014). *BPS: Kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah*, edisi 5 februari.
- Leslie, I. (2014). *Curious: The desire to know and why your future depends on it*. London: Quercus.
- Maksum, A. (2014). National mental model and competitiveness: Transformation toward achieving and progressive behavior. *Anima, Indonesian Psychological Journal*, vol. 29, no. 2.
- Maksum, A. (2011). *Membangun mental prestatif: Tugas utama pendidikan ke depan*. Dalam Sirkit Syah dan Martadi, "Rekonstruksi Pendidikan". Surabaya: Unesa University Press.
- Mayer, J.D. (2014). *Personal intelligence: The power of personality and how it shapes our lives*. New York: Scientific American/Farrar, Straus and Giroux.
- National Academy of Sciences (2011). *Assessing 21st Century Skills: Summary of a Workshop*. Washington: Division of Behavioral and Social Sciences and Education.
- OECD (2013). *PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know*.
- Scimago (2014). *The SCImago Journal & Country Rank*, diunduh 17 Nov 2014.
- The Jakarta Post (2012). *Study shows 67 percent of Jakartans overweight*, Edisi 11 Mei.
- UNDP (2014). *Human development report 2014*. New York: United Nation Development Program.
- Unesco (2005). *The Regional convention on the recognition of studies, diplomas and degrees in higher education in Asia and the Pacific*. Kunming, China: Academic Degrees Committee of the State Council.
- Unesco (2009a). *Education for Sustainable Development*. France: Division for the coordination of United Nations priorities in education.
- Unesco (2009b). *Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. A report prepared for the Unesco 2009 world conference on higher education*. France: Division for the coordination of United Nations priorities in education.
- Wilson, R., et al. (2013). Life-span cognitive activity, neuropathologic burden, and cognitive aging. *Neurology*, vol. 81, no. 4
- World Bank (2014). *World development indicators*. Washington: International Bank for Reconstruction and Development.
- World Economic Forum (2014). *The Global Competitiveness Index 2013–2014*.